



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOEGROHO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG SUPERVISI KPPN DAN KEPATUHAN INTERNAL**
3. NHK : **111432**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.758.000.000**

1. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA PATI, WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/70 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 451.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/29 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 252.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **104.200.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **15.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **162.874.504**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.040.074.504
III. HUTANG	Rp.	67.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.973.074.504

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.